

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut rosemarie (2009, hlm. 79) dalam majalah ilmiah maranatha mengemukakan bahwa:

administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, (tidak dilakukan sendiri/terpisah) melainkan dilakukan dalam satu kesatuan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi Kegiatan tersebut bahkan dapat dikatakan sebagai kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Artinya bahwa administrasi pendidikan sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu institusi pendidikan dengan proses dalamnya yang saling bergantung untuk mencapai tujuan secara optimal.

Stephen J.Knezeich (dalam prihatin, 2011, hlm. 3) mendefinisikan bahwa:

Educational administration is a specialized set of organizational functions whose primary purposes are to insure the efficient and effective delivery of relevant educational service as well as implementation of legislative policies through planning, decision making, and leadership behavior that keeps the organizations focused on predetermined objectives, provides for optimum allocation and most productive uses, stimulates and coordinated professional and other personnel to produce a coherent social system and desirable organizational climate, and facilitates determination of essential changes to satisfy future and emerging needs of student and society.

Uraian tersebut mengandung makna bahwa dalam organisasi dibutuhkan sebuah sistem, sistem untuk mengatur pelayanan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai akan perencanaannya, eksekusi yang dilakukan, tindakan pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi, produktifitas organisasi yang didapati dengan sistem yang mendukung iklim organisasi, strategi untuk memenuhi kebutuhan akan

masa depan pendidikan dalam artian sebuah bentuk manajemen yang merupakan kemasan sebuah sistem di dalam administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan dalam keilmuannya sebagai pengelola sistem pendidikan merupakan arah untuk mencapai tujuan pendidikan, dalam hal ini tujuan pendidikan itu dipetakan dalam fungsi- fungsi ilmu administrasi pendidikan salah satunya yaitu pengorganisasian pendidikan. Dalam memahami arti pendidikan maka makna pendidikan tersebut harus benar benar dikuasai oleh karena itu butuh ahli untuk menentukan strategi pendidikan yang akan dilaksanakan baik saat ini maupun menuju masa yang akan datang.

Dalam sebuah sistem di dalamnya terdiri dari bagian bagian yang saling berhubungan, interaksi ini memiliki kesesuaian tugas untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, dalam sebuah sistem administrasi pendidikan di dalamnya mencakup manajemen. Manajemen sesuai tugas administrasi pendidikan yaitu manajemen Pendidikan.

Manajemen pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah bidang studi dan juga praktik dimana fokusnya kepada operasi organisasi/ lembaga pendidikan termasuk dalam lingkup pendidikan tinggi. Tilaar (2004, hlm. 173) mengajukan sepuluh kecenderungan (mega-trends) sebagai rekonstruksi Sisdiknas yang akan menunjang masyarakat industri modern yaitu; 1) pendidikan dasar, 2) kurikulum, 3) PBM, 4) tenaga kependidikan, 5) pendidikan, 6) pelatihan dan tenaga kerja, 7) pendidikan tinggi, 8) pendidikan berkelanjutan, 9) pembiayaan pendidikan, 10) desentralisasi pendidikan dan partisipasi masyarakat, dan manajemen pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan pada perguruan tinggi didorong dengan sinergik melalui sinergitas yang optimal seperti yang dikemukakan oleh Dodi Nandika (dalam Abbas, 2008, hlm. 146) menyebutkan bahwa “aspek sinergi menjadi kata kunci dalam peningkatan daya saing perguruan tinggi”. Perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Sebuah perguruan tinggi dalam sistem pendidikan, menghadapi berbagai masalah yang cukup kompleks. Dalam menentukan kualitas perguruan tinggi akan dicapai bila pengembangan akademik dilakukan secara terus menerus. Adapun tolak ukur standar kualitas perguruan tinggi dilihat dari standar nasional pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi dapat dikatakan baik apabila memenuhi 8 standar nasional pendidikan tinggi (SNDIKTI). Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Tabel 1. 1

Indikator		Persentase Perguruan Tinggi yang Menerapkan SNDIKTI				
Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			2015-2019	
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	% Capaian
-	67,72%	77,5%	85,13%	109,84%	80%	106,41%

Capaian Presentase Perguruan Tinggi yang menerapkan SNDIKTI

Sumber: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Laporan Kinerja Ditjen Belmawa, 2018, hlm. 120.

Tabel diatas menjelaskan ketercapaian standar nasional pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi. Berdasarkan hasil pemetaan, dari seluruh PT yang telah mengisi data pemetaan SPMI dapat dikatakan telah menetapkan standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI).

Jika seluruh perguruan tinggi yang telah mengisi pemetaan tersebut dibagi dengan jumlah perguruan tinggi dibawah koordinasi Kemeristekdikti yang berjumlah 3.276 (Data PD-Dikti April 2018), maka dengan demikian, realisasi capaian IKP “Persentase perguruan tinggi yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi” pada tahun 2018 adalah sebesar 85,13%. namun demikian karena hanya 447 perguruan tinggi yang telah mengisi pemetaan tersebut.

Terdapat permasalahan pada tahun 2018 dimana realisasi terlaksanakannya revormasi birokrasi pada kemenrisedikti hanya 89,35 % dari target seharusnya, berdasarkan hasil tersebut pada tahun tersebut penilaian reformasi birokrasi tidak lagi hanya dilakukan di pusat, tetapi sampai ke unit di bawahnya, termasuk PTN dan LLDIKTI yang terdiri dari penilaian (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (3) Penguatan Organisasi, (4) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (5) Penataan Tata Laksana, (6)

Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Carut marut kepemimpinan dunia pendidikan adalah isu yang tak terbantahkan, dan sebuah kekhawatiran, permasalahan ini adalah faktualitas. Peresidek Jokowi mengakui permasalahan pendidikan tinggi itu rumit (Faizal Fanani, 2020) ketika peresmian Pembukaan konferensi Forum Rektor Indonesia. Permasalahan Faktual seperti penyelewengan kekuasaan oleh rector, permasalahan pelayanan fasilitas kepada mahasiswa, keputusan pemim[in yang tidak sesuai dengan keinginan civitas kampus, serta permasalahan lain mewarnai perguruan tinggi. karena hal ini berdampak pada sistem kelola sebuah organisasi pendidikan yang memiliki hajat mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan

Perkembangan organisasi masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, perubahan ini nyata adanya akibat proses globalisasi, industry, serta sistem teknologi yang semakin canggih. Dalam kaitannya paradigma pendidikan pada abad 21 di Indonesia ikut terpengaruh oleh adanya perubahan abad ini. pandangan yang diambil ialah bahwa hal ini berpeluang meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, paradigm baru tersebut menurut Wahab (2008, hlm. 73) yaitu bahwa:

kehidupan global merupakan tantangan sekaligus membuka peluang – peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan bagi SDM Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memperoleh kesempatan kerja di luar negeri. Di sinilah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia baik untuk memenuhi SDM yang berkualitas bagi kebutuhan domestic maupun global.

Salah satu yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan tinggi adalah kepemimpinan, mencermati masalah kepemimpinan pada sebuah perguruan tinggi memerlukan keahlian, bahkan disiplin ilmu untuk menjadikan perguruan tinggi yang memiliki daya saing bangsa. Maka dari itu kepemimpinan perguruan tinggi haruslah dikelola oleh SDM yang strategis menghadapi pendidikan masa depan.

Universitas Pendidikan Indonesia menentukan standar mutu, merujuk pada ketentuan berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi dengan analisis sistemik terhadap komponen- komponen sistem

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran dan dampak. Dalam melakukan proses kerjanya diperlukan komando kepemimpinan dan juga pengawasan oleh pimpinan yang berwenang. Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang dipimpinnya. Motivasi orang untuk berperilaku ada dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Agar kepemimpinan pada suatu lembaga pendidikan tinggi dapat dengan sukses memanen mutu terpadu secara berkesinambungan, maka perguruan tinggi perlu melakukan proses secara sistematis. “Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas – aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok.” (Mulyadi dan Rivai, 2013, hlm. 2).

Dalam perguruan tinggi peran pemimpin sangatlah strategi, oleh karenanya pemimpin harus memiliki kemampuan self manajemen. Menurut Bush & Coleman (2008, hlm. 30) mengemukakan bahwa “Self-management, secara intitusional, mengarahkan dan mengelola potensi yang ada dalam institusi dengan pendekatan strategis”. Pemimpin pada perguruan tinggi bertanggung jawab langsung atas manajerial pendidikan, mereka dimungkinkan melakukan pendekatan strategic manajemen, mencakup tentang organisasi dan peranan jangka panjang sebuah kerangka kerja untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang terbaik.

Berdasarkan data paparan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memerlukan manajemen perguruan tinggi untuk berkembang, diperlukan standar dalam pengelolaannya. Oleh karena itu urgensi mengenai kesehatan manajemen dibutuhkan untuk mengukur manajemen pendidikan secara ideal dalam hal ini pada lingkup perguruan tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan penelitian mengenai diagnosa kesehatan manajemen sekolah. “terdapat tujuh variabel dalam penelitian yang berjudul Kesehatan Manajemen Sekolah Tahun 2018.” (Triatna dkk. 2019). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ini merupakan penelitian tahap awal yang menghasilkan struktur pengetahuan patologi manajemen sekolah sebagai bagian dari patologi organisasi pendidikan. Patologi disini memiliki definisi sebagai suatu kajian terhadap penyakit-penyakit yang berkembang dalam

interaksi sosial orang-orang di dalam suatu organisasi pendidikan (Triatna dkk. hlm. 3). Dalam kajian patologi organisasi pendidikan ini tentunya diperoleh deskripsi dan substansi dari penyakit manajemen sekolah dan tentunya terdapat langkah yang lebih lanjut untuk dapat mendeskripsikan bagaimana sebab-akibat serta pemecahannya. Dalam penelitian ini penyakit manajemen sekolah yang dimaksud adalah kaitannya kepemimpinan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dalam memecahkan permasalahan ini, perlu dibuat pengembangan instrument untuk mendeteksi (penyakit) manajemen sekolah. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 merupakan tahap kedua yang menghasilkan Instrumen Diagnosa Kesehatan Manajemen Sekolah yang dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian dan alat ukur untuk mendiagnosa kesehatan kepemimpinan sekolah. Menganalisis instrumen pasti ada pedoman yang digunakan oleh perguruan tinggi dalam menjalankan roda organisasi. Salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan organisasi pada perguruan tinggi adalah kesehatan kepemimpinan yang dapat mengantarkan perguruan tinggi berkembang dan berdaya saing.

Oleh karenanya penelitian ini merupakan salah satu tindak lanjut dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triatna, Sudarsyah, Suryadi (2019), yang dikembangkan kedalam scope lembaga pendidikan yang lebih besar yaitu perguruan tinggi, khususnya pada tema kesehatan kepemimpinan perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Dengan ini peneliti bermaksud akan melakukan penelitian untuk mengembangkan instrumen diagnosa kesehatan kepemimpinan sekolah untuk dapat digunakan di perguruan tinggi. Dengan demikian, peneliti mengajukan penelitian dengan judul “ANALISIS INSTRUMEN DIAGNOSIS KESEHATAN KEPEMIMPINAN PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, sehingga dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana instrumen diagnosis kesehatan kepemimpinan di perguruan tinggi?

Siti Atika A, 2020

ANALISIS INSTRUMEN DIAGNOSIS KESEHATAN KEPEMIMPINAN PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagaimana diagnosis kesehatan kepemimpinan di perguruan tinggi?
3. Bagaimana tindak lanjut hasil diagnosis kesehatan kepemimpinan di perguruan tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar peneliti mempunyai arah dan tujuan yang jelas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui instrumen diagnosis kesehatan kepemimpinan di perguruan tinggi.
2. Mengetahui diagnosis kesehatan kepemimpinan di perguruan tinggi.
3. Mengetahui tindak lanjut hasil diagnosis kesehatan kepemimpinan di perguruan tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis di lapangan.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat dan diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam mengembangkan ilmu Patologi Organisasi Pendidikan, khususnya dalam pengembangan instrumen kesehatan kepemimpinan di perguruan tinggi.

2. Manfaat dari Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini dilaksanakan (instrumen) digunakan sebagai alat dan bahan dalam pengembangan instrumen kesehatan kepemimpinan di perguruan tinggi. Adapun manfaat lainnya sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dilaksanakan untuk menambah wawasan, pengalaman, daya analitis serta penerapan ilmu administrasi pendidikan dalam memecahkan masalah manajemen perguruan tinggi, khususnya mengenai kepemimpinan perguruan tinggi.
- b. Bagi perguruan tinggi, diharapkan instrumen kepemimpinan perguruan tinggi dapat digunakan dalam mengukur kesehatan kepemimpinan perguruan tinggi, sehingga tidak terjadi kebingungan

dalam melihat serta mengukur bagaimana kepemimpinan yang sudah baik atau belum (sehat atau sakit).

- c. Bagi Program Studi Administrasi Pendidikan, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah dan memberikan kontribusi keilmuan serta mengisi kekosongan dalam pengembangan instrumen kesehatan kepemimpinan perguruan tinggi, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isi skripsi ini, penulis sajikan uraian dari sistematika skripsi sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. BAB II Kajian Pustaka, berisi konsep-konsep dan teori-teori yang melandasi penelitian, diperoleh dari buku dan sumber-sumber lain yang mendukung. Konsep-konsep dan teori-teori dalam penelitian ini yaitu mengenai konsep manajemen perguruan tinggi dan konsep kesehatan kepemimpinan perguruan tinggi.
3. BAB III Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian serta komponen-komponen penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan, memuat pengolahan atau analisis data beserta pembahasan atau analisis hasil temuan di lapangan dengan pemaparan dan pembahasan data yang disajikan.
5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.